

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA
STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 – 2029**

- Judul : Rancangan Peraturan Bupati Bangka Nomor Tahun 2025 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2025 – 2029
- Kata Pengantar : Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatNya, dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bangka ini dapat disusun sebagai bagian dari dokumen yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pembangunan sanitasi ke depan. Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Bangka ini disusun sebagai upaya menghimpun berbagai alternatif pilihan yang prioritas dari seluruh program pembangunan sanitasi yang ada, dengan mengintegrasikan seluruh kemampuan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bangka.
- Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang telah disiapkan dalam jangka waktu relatif singkat ini, dapat menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan Kabupaten Bangka dalam upaya memaksimalkan dan mengaktualisasikan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan disiapkan dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan perkembangan kota yang dinamis dan cendrung berubah. Berbagai isu strategis baik dari sisi aspek teknis dan non-teknis yang dimasukkan dalam penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), yang kemudian dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Bangka pada tahun-tahun berikutnya.
- Pada sisi lain, komitmen dan perhatian yang serius dari seluruh OPD termasuk unsur masyarakat dan pihak swasta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga semua rencana yang dibuat dapat direalisasikan. Dengan demikian, diharapkan dokumen perencanaan strategis ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan.
- Ucapan terima kasih kepada tim penyusun dan para pemangku kepentingan yang telah berperan serta dalam menyelesaikan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Bangka ini. Kiranya dokumen ini dapat menjadi bahan referensi penting dalam pengambilan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan sanitasi Kabupaten Bangka secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif. Terima kasih.
- Daftar isi : Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab 1 Pendahuluan
Bab II Profil Sanitasi
Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi
Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi
Bab V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
- BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih besar dan perlu ditingkatkan menjadi prioritas pembangunan terutama di tingkat pemerintah daerah. Hal ini terindikasi dari kondisi sanitasi di Indonesia yang masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG'S) salah satunya adalah mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua masyarakat, sedangkan saat ini akses sanitasi layak secara nasional baru mencapai 80,92% dan capaian di daerah masih terjadi gap yang sangat tinggi yaitu akses sanitasi layak tertinggi 100% dan terendah 4,4%.

Dari gambaran tersebut, perlu komitmen bersama agar target RPJMN di 2024, yakni 90% akses sanitasi layak (termasuk 15% akses sanitasi aman), serta 0% Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka pada tahun 2030 dapat dicapai. Capaian Sanitasi tahun 2022 yakni 80,92% untuk akses sanitasi layak (termasuk 10,16% untuk sanitasi aman).

Pada tahun 2024 ini Kabupaten Bangka telah melakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sesuai arah kebijakan RPJMN 2020-2024, yaitu pencapaian target “Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2024”. Namun saat ini dokumen tersebut perlu di mutakhirkan kembali mengingat berdasarkan hasil penilaian bahwa dokumen SSK tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi eksisting saat ini, selain itu dengan adanya arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yaitu “Sistem Layanan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan”, perlu peningkatan kualitas dokumen SSK yang disusun tahun sebelumnya serta adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terkait dengan target layanan akses aman tahun 2029. Pemutakhiran SSK dilakukan dengan mengacu kepada 4 features/syarat utama dari SSK, yaitu: (1) Dilakukan dari, oleh dan untuk kabupaten/kota (2) Komprehensif, lintas sektor dan berskala kota/kabupaten; dan (3) Menggunakan data empiris; dan (4) Menggunakan pendekatan top down – bottom up.

Target sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bangka adalah untuk pemenuhan “Sistem Layanan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan”, di akhir tahun 2029. Adapun rincian capaian akses sanitasi Kabupaten Bangka yang diukur pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Air Limbah

Akses aman sebesar 2,11%, akses layak sebesar 100%, akses belum layak sebesar 0% dan BABS di tempat terbuka sebesar 0%.

2. Persampahan

Pengelolaan Sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan dengan volume timbulan sampah di Kabupaten Bangka di 8 Kecamatan yang terdiri dari 62 desa 19 kelurahan pada tahun 2023 mencapai 83.585 Ton/Tahun dengan penanganan sampah sebesar 52%, pengurangan sebesar 1,6% dan sampah yang belum terkelola 46,4%

3. Drainase

Terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun yang terdiri dari Pengentasan genangan sebesar 50%, Pengurangan genangan sebesar 50%, (sesuai target SPM nasional yaitu Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014).

B. Metode Penyusunan

Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka disusun oleh Tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Bangka secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi secara rutin dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dari Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan

dokumen perencanaan yang lengkap. Adapun proses yang dilakukan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA).
2. Pengumpulan data berupa data primer dan sekunder.
3. Mendapatkan Komitmen Kepala Daerah
4. Menetapkan Kebijakan untuk uji coba model layanan
5. Uji coba layanan skala terbatas.
6. Memantau pelaksanaan uji coba model layanan
7. Evaluasi pelaksanaan uji coba model layanan

Penyusunan SSK oleh Pokja PKP Kabupaten Bangka didampingi oleh Tim Pendamping baik dari Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPPW Bangka Belitung maupun Province Facilitator Implementasi PPSP.

C. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
8. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persamahan dalam Penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005 – 2025
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023
40. Peraturan Bupati Bangka Nomor 46A Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
41. Peraturan Bupati Bangka Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangka dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
42. Peraturan Bupati Bangka Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja
43. Keputusan Bupati Bangka Nomor 118.45/256/DINPERKPP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Nomor: 118.45/207/DINPERKPP/2022 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Tahun 2023.

D. Sistematika Penulisan

Mempedomani Petunjuk Teknis Outline Penyusunan dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemerintah Pusat melalui Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, sistematika penulisan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2028 disusun sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberikan informasi terkait latar belakang dilakukannya pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), metodologi penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II Profil Sanitasi Saat Ini

Merupakan informasi persamaan persepsi kondisi sanitasi di daerah, wilayah kajian SSK dan kondisi umum kabupaten/kota, capaian program pada perencanaan SSK periode sebelumnya, dan penjelasan profil sanitasi kabupaten/kota yang menjadi acuan pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah. Bab II Profil Sanitasi Saat ini terdiri dari:

- a. Gambaran Wilayah
- b. Profil Sanitasi Saat Ini
- c. Target Akses Kabupaten/Kota yang ingin dicapai
- d. Permasalahan Sanitasi dan Area Beresiko Sanitasi.

Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi

Bab ini menjelaskan kerangka pengembangan sanitasi di kabupaten/kota. Informasi yang disampaikan pada bab ini meliputi

- a. Visi dan Misi Sanitasi
- b. Rencana Pengembangan Sanitasi yang meliputi Tahapan Pengembangan Sanitasi, Tujuan dan Sasaran Sanitasi, dan Skenario Pencapaian Sasaran

- c. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi

Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis dan aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin) pada tiga sektor sanitasi, yaitu:

- a. Air Limbah Domestik
- b. Pengelolaan Persampahan
- c. Drainase Perkotaan.

Bab V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi untuk mencapai target pembangunan sanitasi di kabupaten/kota untuk periode 5 tahun ke depan. Bab ini terdiri dari

- a. Ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi
- b. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah
- c. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah
- d. Antisipasi Funding Gap.

Bab VI Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Bab ini menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK lima tahun kedepan.

BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI

1. Capaian Akses Air Limbah Domestik

Kondisi capaian akses air limbah domestik di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut. Pada wilayah perkotaan, cakupan layanan air limbah domestik dengan akses aman sebesar 1,68%, akses layak sebesar 47,92%, dan akses belum layak sebesar 0,00%. Untuk perilaku Buang Air Besar di tempat terbuka juga sudah 0,00%. Sementara pada wilayah perdesaan, cakupan akses air limbah domestik aman sebesar 1,06%, akses layak sebesar 52,08%, dan akses belum layak sebesar 0,00%. begitu juga dengan perilaku Buang Air Besar di tempat terbuka sudah 0,00%. Cakupan akses aman air limbah domestik yang masih kecil disebabkan oleh pembangunan IPAL serta tangki septik masyarakat yang disedot masih rendah baru terlaksana di beberapa wilayah saja.

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	1,68%
B	Akses Layak Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman) Akses Layak Bersama	47,92% 46,01% 0,22%
C	Akses Belum Layak*	0,00%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	0,00%

Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	1,06%
B	Akses Layak	52,08%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	50,68%
	Akses Layak Bersama	0,33%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,00%
C	Akses Belum Layak*	0,00%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	0%
Total		100,00%

2. Capaian Akses Persampahan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	1,6%
2	Penanganan Sampah	57,3%
3	Sampah Tidak Terkelola	41,1%
Total		100,0%

Adapun capaian akses persampahan Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel di atas.

3. Area Beresiko Sanitasi

Area beresiko sanitasi di Kabupaten Bangka dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu resiko sangat tinggi, resiko tinggi, resiko sedang dan resiko rendah. Berdasarkan hasil analisis, untuk sektor air limbah domestic wilayah Kabupaten Bangka yang memiliki resiko Air Limbah Domestik sangat tinggi tidak ada sementara untuk wilayah resiko tinggi berada di 4 (empat) yaitu Kecamatan Mendo Barat yaitu Desa Kace, Air Duren, Petaling, Menduk, Payabenua, Kemuja dan Labuh Air Pandan Kecamatan Puding Besar yaitu Desa Puding Besar dan Labu, Kecamatan Sungailiat yaitu Kelurahan Parit Padang, Srimenanti, Sungailiat dan Kuday, Kecamatan Belinyu yaitu Desa Gunung Muda dan Kelurahan Kuto Panji.

Adapun area berisiko bidang persampahan di Kabupaten Bangka yang memiliki risiko 4 (sangat tinggi/ warna merah) terdapat di Kecamatan Sungailiat Kelurahan Sungailiat Sedangkan untuk area berisiko 3 (tinggi/warna kuning) terdapat di Kecamatan Mendo Barat yaitu Desa Kace, Petaling, Kace Timur, Petaling Banjar, Kecamatan Merawang yaitu Desa Kimak, Balunijuk, Pagarawan, Baturusa, Kecamatan Puding Besar yaitu Desa Puding Besar sementara Kecamatan Sungailiat yaitu Kelurahan Srimenanti, Kuday, Jelitik dan Sinar Jaya Jelutung.

BAB III

: KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Pokja PKP telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang diturunkan dari dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 – 2029. Karena penyusunan dokumen ini dilakukan pada masa transisi pemerintahan daerah, Kabupaten Bangka tidak memiliki visi dan misi kabupaten. Tabel di

bawah ini merupakan gambaran tentang Visi Sanitasi Kabupaten Bangka dan Misi per-subsektor

Visi Kabupaten Bangka	Misi Kabupaten Bangka	Visi Sanitasi Kabupaten Bangka	Misi Sanitasi Kabupaten Bangka
		Terwujudnya Kabupaten Bangka yang bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan tahun 2029	<p>Misi Air Limbah Domestik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan untuk meningkatkan akses aman air limbah domestik 2. Menyiapkan peraturan perundangan yang mendukung peningkatan layanan sistem penyelenggaraan air limbah domestik yang berkelanjutan 3. Meningkatkan sinergitas antar perangkat daerah untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat 5. Membangun kemitraan strategis antar pemerintah daerah dengan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat sanitasi buruk dan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola infrastruktur sistem pengolahan air limbah domestic. <p>Misi Persampahan (Mewujudkan Tata Kelola Pengelolaan Sampah yang Berkualitas):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

			<p>pemilahan dan pengolahan sampah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan persampahan 4. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan 6. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan serta pengembangan alternatif sumber pembiayaan
<p>Misi Drainase:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sarana pengendalian banjir untuk melindungi kawasan permukiman, daerah-daerah produksi pertanian, kawasan perkotaan dan industri dengan mewujudkan pembangunan pengairan yang berwawasan lingkungan 2. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana drainase dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah menuju ke arah kemandirian 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase serta mendorong parsipatif masyarakat 5. Menyiapkan peraturan perundangan dalam 			

			penyelenggaraan sistem pengelolaan Drainase
--	--	--	---

- BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI
- a. Rumusan strategi pengembangan air limbah domestic adalah sebagai berikut:
- i. Meningkatkan akses sanitasi layak menjadi sanitasi aman baik wilayah perkotaan maupun perdesaan melalui kolaborasi sumber pendanaan
 - ii. Meningkatkan peran UPTD untuk memfungsikan Kembali IPLT yang ada agar dapat terkelola dengan baik
 - iii. Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan air limbah domestic
 - iv. Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber dalam pengelolaan air limbah domestic
 - v. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola dalam air limbah domestic
 - vi. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi hygiene dan sanitasi aman berkelanjutan
- b. Rumusan strategi pengembangan persampahan adalah sebagai berikut:
- i. Optimalisasi sarana dan prasarana persampahan
 - ii. Optimalisasi sarana dan prasarana pengurangan sampah
 - iii. Pembinaan kelembagaan masyarakat pengelola persampahan (KSM/KPP)
 - iv. Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan persampahan
 - v. Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber dalam pengelolaan persampahan
 - vi. Meningkatkan Kerjasama dengan swasta dan masyarakat alam pengelolaan persampahan
 - vii. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelola sampah
 - viii. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi hygiene dan sanitasi aman berkelanjutan

- BAB V : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN
- Berdasarkan kondisi sanitasi di Kabupaten Bangka, maka disusunlah kebutuhan anggaran untuk memenuhi target sanitasi pada setiap sub sektor sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, drainase dan kegiatan penunjang), dimana untuk Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini.

A. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun (x Rp. 1 Juta)

N o.	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	9.063	18.300	17.793	17.012	18.408	80.577
2	Persampahan	9.233	24.792	37.140	21.683	19.472	31.743
Jumlah (a)		18.296	43.092	54.933	38.695	37.880	112.320
Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi (b)		1.754	2.612	2.595	1.720	2.076	14.598

Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi (c)	500	505	510	515	520	2.550
Gap1 (a -b)	16.542	40.480	52.338	36.975	35.804	97.722
Gap2 (a-c)	17.796	42.587	54.423	38.180	37.360	109.770

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

B. Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 Tahun (x Rp. 1 Juta)

No .	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan	18.296	43.092	54.933	38.695	37.880	112.320
2	Kemampuan Pendanaan	1.754	2.612	2.595	1.720	2.076	14.598
3	Selisih (Rp)	16.542	40.480	52.338	36.975	35.804	97.722
4	Selisih %	90%	94%	95%	96%	95%	87%

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

C. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran (x Rp. 1 Juta)

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten / Kota	1.754	2.612	2.595	1.720	2.076	14.598
2	APBD Provinsi	1.095	1.645	1.645	1.330	830	6.545
3	APBN	385	5.705	18.245	4.774	1.805	30.913
4	DAK	-	385	1.535	1.035	3.429	6.384
Jumlah A		3.234	10.347	24.020	8.859	8.140	58.440
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	77	77	77	127	232	590
2	Masyarakat	14.396	6.625	12.519	12.700	12.223	11.968
Jumlah B		14.473	6.702	12.596	12.827	12.455	12.558
Total (A + B)		17.707	17.049	36.616	21.686	20.595	70.998
Daftar Tunggu (Kebutuhan - A - B)		-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

Sementara itu, rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Bangka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode tahun 2025 - 2029, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten Bangka, APBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan APBN) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

A. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota (x Rp. 1 Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	896	1.754	1.632	662	1.218	6.161
2	Persampahan	142	142	247	192	142	4.857
Jumlah		1.038	1.896	1.879	854	1.360	11.018

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

B. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi (x Rp. 1 Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	1.035	1.035	1.035	770	770	4.645
2	Persampahan	60	610	610	560	60	1.900
	Jumlah	1.095	1.645	1.645	1.330	830	6.545

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

C. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN (x Rp. 1 Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	385	2.420	770	2.070	1.805	7.450
2	Persampahan	-	3.285	17.475	2.704	-	23.463
	Jumlah	385	5.705	18.245	4.774	1.805	30.913

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

D. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK (x Rp. 1 Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	-	385	1.535	1.035	2.720	5.675
2	Persampahan	-	-	-	-	709	709
	Jumlah	-	385	1.535	1.035	3.429	6.384

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

E. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR (x Rp. 1 Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	77	77	77	77	77	385
2	Persampahan	-	-	-	50	155	205
	Jumlah	77	77	77	127	232	590

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

F. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat (x Rp. 1 Juta)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2025	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	6.625	12.519	12.700	12.223	11.968	56.036
2	Persampahan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.625	12.519	12.700	12.223	11.968	56.036

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kab. Bangka, 2024

BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring capaian SSK bertujuan untuk memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi capaian dan kelemahannya, menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian SSK ini diharapkan menjadi umpan balik bagi pengambil keputusan dalam hal:

1. Kemajuan capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang telah disepakati.
2. Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi.
3. Kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi sanitasi.